

**KETIDAKPATUHAN BRAZIL TERHADAP *ARMS TRADE*  
*TREATY* TERKAIT REGULASI SENJATA ILEGAL  
BRAZIL TAHUN 2018-2022**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat*

*Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada*

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Andalas*

**Oleh :**

**AMANDA KHAIRUNISSA YUNUS**

**1910852024**

**Pembimbing I:**

Anita Afriani

Sinulingga, S.IP.M.Si

**Pembimbing II:**

Zulkifli Harza, S. IP, M. Soc. Sc



**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa ketidakpatuhan Brazil dalam mematuhi *Arms Trade Treaty* selama pemerintahan Brazil tahun 2018-2022 dapat terjadi. Masalah dari penelitian ini ialah adanya isu perdagangan senjata ilegal yang marak terjadi di Brazil hingga menjadi negara dengan kekerasan HAM bersenjata tertinggi dunia 2021 yang dipicu oleh dekrit Bolsonaro. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan kondisi yang diharapkan ketika Brazil resmi menjadi negara anggota *Arms Trade Treaty*. Perubahan yang dilakukan Bolsonaro terhadap implementasi statuta 2003 yang seharusnya sudah mematuhi ATT dengan efektif, telah menimbulkan pelanggaran terhadap HAM dan ATT. Dengan menggunakan konsep kepatuhan dan ketidakpatuhan Oran R. Young dalam “Compliance and Public Authority: A Theory with International Applications”, yang mendefinisikan kepatuhan mengacu pada semua perilaku subjek atau aktor yang sesuai dengan persyaratan resep perilaku atau sistem kepatuhan dan mendefinisikan ketidakpatuhan (atau pelanggaran) sebagai perilaku yang gagal memenuhi persyaratan tersebut yang menjelaskan definisi ketidakpatuhan, penulis akan menjelaskan bahwa Brazil sudah melakukan ketidakpatuhan terhadap ATT. Kemudian, dengan menggunakan konsep kepatuhan dan ketidakpatuhan Chayes dan Chayes akan dijelaskan bagaimana ketidakpatuhan tersebut terjadi dengan tiga indikator ketidakpatuhan Chayes dan Chayes tersebut, sehingga penulis dapat meneliti bagaimana ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT dapat terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis menggunakan sumber sekunder dengan menggunakan laman resmi ATT dan ATT-BAP, artikel jurnal yang mendukung sebagai fakta ketidakpatuhan. Penulis menemukan bahwa penyebab ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT ialah dikarenakan oleh Dekrit Bolsonaro yang dipicu oleh keterbatasan kapasitas pemerintahan Brazil dan kelompok kriminal Brazil.

**Kata Kunci:** ATT, Bolsonaro, Brazil, Ketidakpatuhan, Kelompok kriminal



## ABSTRACT

*This study aims to analyze why Brazil's non-compliance in complying with ARMS Trade Treaty during the Brazilian government in 2018-2022 can occur. The problem of this study is the issue of illegal weapons trade that is rife in Brazil to become a country with the highest armed human rights violence in 2021 which was triggered by the Bolsonaro Decree. These conditions are contrary to the expected conditions when Brazil officially becomes a member country of ARMS Trade Treaty. The changes made by Bolsonaro to the implementation of the 2003 Statutes which should have complied with ATT effectively, have caused violations of human rights and ATT. By using the concept of compliance and non-compliance with R.Young in "Compliance and Public Authority: A Theory with International Applications", which defines compliance with all the subjects of subjects or actors in accordance with the recipe requirements or compliance systems and defines non-compliance (or violations) As a behavior that fails to meet these requirements that explain the definition of non-compliance, the author will explain that Brazil has made non-compliance with ATT. Then, using the concepts of compliance and non-compliance of Chayes and Chayes will be explained how the non-compliance occurs with three indicators of Chayes and Chayes's compliance, so that the author can examine how Brazil's non-compliance with ATT can occur. This study uses a qualitative research method with a descriptive analysis approach using secondary sources using the official ATT and ATT-BAP page, a journal article that supports as a facts of non-compliance. The author found that the cause of Brazil's non-compliance with ATT was due to the Bolsonaro decree which was triggered by the limited capacity of the Brazilian government and Brazilian criminal groups.*

**Keywords: ATT, Bolsonaro, Brazil, non-compliance, criminal groups**

